

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Teory Agensi (*Agency Theory*)

Teori Agensi (*agency theory*) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Perusahaan dianggap sebagai serangkaian kontrak antara manajer dan pemegang saham perusahaan. Prinsipal atau pemilik perusahaan telah mendelegasikan kendali atas perusahaan kepada dewan direksi. Sebagai individu yang perlu memberdayakan kegiatan perusahaan dan menyampaikan laporan keuangan, manajemen cenderung melaporkan sesuatu yang memaksimalkan kegunaannya dan mengorbankan kepentingan pemegang sahamnya. Sebagai direktur sebuah perusahaan, manajer lebih mengenal informasi orang dalam perusahaan dan perspektif daripada pemiliknya (pemegang saham). Meskipun perusahaan ini menyebabkan konflik keagenan karena informasi yang disampaikan mungkin tidak menerima keadaan perusahaan yang sebenarnya.

Para pelaku kecurangan melakukannya untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak memikirkan secara panjang dampak perbuatannya terhadap masa desa. Mereka cenderung menghindari resiko. Akibat adanya kecurangan yang terjadi, sering kali menyebabkan informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi perusahaan atau sering disebut dengan asimetri informasi. Asimetri informasi

dapat memberikan peluang kepada agen untuk meningkatkan kemakmurannya sendiri. Agen mencari keuntungan untuk mendapatkan bonus.

2.1.2. Definisi Pengelolaan Keuangan Desa

(Undang-undang RI No 6, 2014) beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanahkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Pada APBN-P 2015, ± 20,776 triliun rupiah dana yang dialokasikan ke seluruh desa yang ada di Indonesia.

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Peran besar yang diterima oleh desa juga diberikan tanggung jawab yang sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah desa harus mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam program kerjanya dan didalam program kerja pemerintah desa diharapkan mampu menjalankan sesuai dengan peraturan yang ada. Sumber Daya Manusia (SDM) berperan penting dalam kompeten dan kualitas karena mendapatkan peran penting dan tanggung jawab yang dilakukan di desa, untuk saat ini yang menjadi kendala sepenuhnya belum tercermin. Kendala lainnya adalah di desa belum memiliki prosedur sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangan desa. Melihat besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintahan desa dan menjadi resiko yang sangat tinggi. Tidak asing lagi terdapat banyak pejabat lokal yang terlibat *fraud* dan diharapkan tidak terjadi kembali.

2.1.3. Asas Pengelolaan Keuangan

Nomor 113 Tahun 2014 terdapat asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa yang disajikan dalam Permendagri yaitu Transparan, Akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.1.4. Struktur Organisasi Keuangan Pemerintah Desa

Kedudukan tertinggi di Pemerintahan Desa di pegang oleh Kepala Desa. Namun pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) diserahkan kepada perangkatnya untuk dikerjakan bersama-sama, yang terdiri dari :

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemegang Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Namun Pengelolaan Keuangan Desa di serahkan ke perangkat desa untuk di kerjakan bersama-sama.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku koordinator diberikan wewenang daei Kepala Desa di dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan bertanggung jawab.

3. Bendahara Desa

Bendahara Desa merupakan unsur PTPKD yang dipilih langsung oleh staf yang memiliki wewenang mengurus keuangan dan mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan dan pengeluaran biaya anggaran.

4. Kepala Seksi

Unsur dari PTPKD adalah kepala seksi yang memiliki tugas menjadi pelaksana kegiatan yang sesuai dengan bidangnya, salah satunya menyusun RAB.

2.1.5. Definisi Kecurangan (*Fraud*)

Kecurangan (*Fraud*) adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan memiliki kemampuan tipu daya, licik dan tidak etis yang sering dilakukan oleh pejabat tinggi, pegawai, investor, penjual maupun pelanggan yang tujuannya

untuk mendapatkan keuntungan material yang mengakibatkan kerugian banyak pihak (Rozmita. D, 2017). *Fraud* bisa terjadi di semua jenis organisasi baik organisasi swasta maupun organisasi pemerintahan. Di Indonesia sudah banyak terjadi kasus *fraud* atau dikenal dengan istilah korupsi dengan penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan yang tinggi mampu melupakan tanggung jawab dan merugikan banyak pihak bahkan negara.

Kecurangan diterjemahkan dengan penyimpangan sesuai *Pernyataan Standart Auditing* No. 70. Sama halnya dengan error dan irregularities masing-masing diterjemahkan sebagai kekeliruan dan penyimpangan sesuai PSA sebelumnya yaitu PSA No. 32. Menurut standar auditing, faktor yang membedakan penyimpangan dan kekeliruan adalah apakah tindakan yang mendasarinya yang berakibat terjadinya kekeliruan dalam laporan keuangan, berupa tindakan yang sengaja atau tidak sengaja.

2.1.6. Skema *Fraud*

1. *Corruption* (Korupsi)

Korupsi biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan tinggi di instansi/ perusahaan dengan menyalahgunakan wewenang di berikan. *Fraud* sering kali sulit dideteksi karena para oknum melakukan kerjasama dan menikmati keuntungannya. Studi dari para *Certified Fraud Examiners* (CFE) menunjukkan empat jenis utama korupsi yakni, *conflicts of interest* (konflik kepentingan), *bribery* (penyuapan), *illegal gratuities* (persenan ilegal), dan *economic extortion* (pemerasan ekonomi).

2. *Asset Misappropriation* (Penyalahgunaan Aset)

Aset dapat digelapkan oleh pelaku dengan cara langsung maupun tidak langsung digunakan untuk kepentingan pribadi. Penyalahgunaan aset termasuk tindakan illegal atau sering disebut sebagai pencurian aset dengan pengeluaran biaya perusahaan/ instansi dengan curang. Teknik yang tepat untuk mendeteksi kecurangan tipe ini adalah pemahaman yang baik mengenai pengendalian internal dalam pos-pos.

3. *Financial Statement Fraud* (Memanipulasi Laporan Keuangan)

Memanipulasi laporan keuangan berkaitan dengan motivasi untuk melakukan *fraud* untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun dari penilaian *fraudulent Statements Fraud* penilaian kerja dalam kasus ini paling sedikit terjadi dibandingkan dengan 2 (dua) skema yang lainnya hanya 5% dari keseluruhan kasus yang ada namun menurut *Certified Fraud Examiner* (CFE) jumlah kerugian yang dilakukan oleh pelaku manipulasi menempati peringkat tertinggi.

2.1.7. *Fraud Diamond*

Fraud Diamond merupakan pandangan baru tentang fenomena kecurangan (*fraud*) yang dikemukakan oleh (Wolfe & Hermanson, 2004). Pengertian *Fraud Diamond* yaitu suatu bentuk penyempurna dari *Fraud Triangle* oleh Cressey (1953). *Fraud* menambahkan satu elemen yang berpengaruh signifikan untuk melakukan *fraud* yakni *capability* (kemampuan) menyebut bahwa untuk meningkatkan pencegahan dan pendeteksian kecurangan perlu unsur individual *capability* (kemampuan). *Capability* diyakini memiliki kemampuan memainkan peran utama dalam melakukan kecurangan ditambah dengan kehadiran tiga

elemen lainnya. Keempat elemen ini dikenal sebagai “*Fraud Diamond*” (Wolfe & Hermanson, 2004).

Terdapat 4 elemen-elemen penting di dalam *Fraud Diamond* yaitu *Pressure* (Tekanan), *Opportunity* (Kesempatan), *Rationalization* (Rasionalisasi), *Capability* (Kemampuan) yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a. *Pressure* (Tekanan)

Elemen pertama dari ujung segitiga yaitu *Pressure* (Tekanan), biasanya seseorang melakukan *fraud* salah satunya karena adanya tekanan finansial dan berhubungan langsung dengan *financial stability*, *eksternal pressure*, *personal financial*. Seseorang melakukan *fraud* karena selalu merasa tidak puas dengan apa yang di dapatkan, kemudian pihaknya rela melakukan banyak cara untuk memenuhi hasrat kepuasannya dan berakibat banyaknya tagihan hutang dan tidak mampu membayar sehingga memicu terjadinya *fraud* (Shelton et al., 2014) menyatakan bahwa tekanan adalah motivasi seseorang untuk melakukan penipuan, biasanya karena beban keuangan. Tekanan juga dapat dikatakan sebagai keinginan atau intuisi seseorang yang terdesak melakukan kejahatan.

b. *Opportunity* (Kesempatan)

Opportunity (Kesempatan) adalah dimana kondisi seseorang memungkinkan untuk melakukan kecurangan. Profesi akuntansi dan COSO (*the Committee of Sponsoring Organizations*) mendefinisikan komponen-komponen yang berpengaruh terjadinya *fraud* yaitu lingkungan pengendalian, sistem akuntansi dan aktivitas prosedur pengawasan.

c. *Rationalization* (Rasionalisasi)

Rationalization (Rasionalisasi) merupakan elemen ketiga dari *fraud triangle* yang paling sulit diukur (Skousen et al., 2009). Rasa rasionalisasi yang terdapat pada para koruptor menganggap tindakan yang dilakukan adalah pembenaran atau rasionalisasi, yang hasilnya apa yang sedang dilakukan adalah suatu tindakan yang biasa saja atau wajar. Mereka yang terlibat dalam penipuan laporan keuangan mampu merasionalisasi tindakan penipuan secara konsisten dengan mereka kode etik mereka (Faradiza & Suyanto, 2017).

d. *Capability* (Kemampuan)

Capability (Kemampuan) adalah elemen ke empat dalam *fraud diamond*, elemen ini menjadi faktor penting dalam sebuah tindakan kecurangan (Wolfe & Hermanson, 2004) Posisi dan jabatan dalam organisasi membuka kesempatan untuk seseorang melakukan *fraud* dibandingkan di posisi yang lain.

2.1.8. Kesesuaian Kompensasi

(Pangabebean & Trisakti, 2004) Kesesuaian kompensasi didefinisikan sebagai setiap bentuk apresiasi kepada karyawan sebagai imbalan atas kontribusinya untuk organisasi. Tujuan kompensasi Sebagai ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pembelian yang efektif, Motivasi, stabilitas karyawan, disiplin. Beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah kompensasi adalah penawaran dan permintaan tenaga kerja, kapasitas dan kehendak perusahaan dan serikat pekerja organisasi buruh /karyawan, produktivitas karyawan. Menurut (Wilopo dan Mustikasari, 2013) indikator kesesuaian kompensasi :

- a. Kompensasi keuangan desa.
- b. Instansi atas keberhasilan dalam melaksanakan tugas.
- c. Promosi media
- d. Penyelesaian tugas dan tanggung jawab
- e. Pencapaian sasaran
- f. Pengembangan pribadi

2.1.9. Keefektifan Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terkait laporan keuangan adalah proses yang dirancang untuk memberikan kepercayaan diri yang cukup dalam keandalan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, yang mana akan menghasilkan laporan keuangan memiliki nilai informasi. Berdasarkan peraturan pemerintah RI nomor 60, 2008 menyatakan bahwa pengendalian intern meliputi berbagai kebijakan, sebagai berikut :

1. Terkait dengan catatan keuangan.
2. Memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standart akuntansi pemerintah, serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otoritas yang memadai.
3. Memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan pemerintah.

Jika SPIP diterapkan dengan lancar maka laporan keuangan yang dihasilkan akan memiliki nilai informasi yang baik, sebaliknya jika SPIP tidak diterapkan dengan lancar maka laporan keuangan yang dihasilkan tidak akan memiliki nilai

informasi yang baik. Menurut COSO (2013) indikator keefektifan sistem pengendalian internal :

- a. Patuh terhadap manajemen resiko.
- b. Patuh terhadap pengendalian.
- c. Patuh terhadap informasi yang komunikasi.
- d. Patuh terhadap lingkungan pengendalian internal.
- e. Patuh terhadap pemantauan pengendalian intern.

2.1.10. Budaya Organisasi

(Chudasama & Robbins, 2003) Budaya Organisasi yakni sistem bersama yang dikesepakati oleh anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi yang lainnya. Budaya organisasi terdapat dalam sekumpulan keyakinan bersama, sikap dan tata hubungan serta asumsi mampu diterima oleh seluruh anggota organisasi untuk menghadapi lingkungan eksternal dalam mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini budaya organisasi sangat berperan penting dalam motivasi.

(Chudasama & Robbins, 2003) mengatakan bahwa pelaksanaan budaya organisasi dapat di nilai dari dimensi organisasi. Dimensi organisasi ditetapkan melalui studi empiris yang menggunakan sample dan melibatkan beberapa organisasi, hasilnya namun tidak ditemukan dimensi budaya yang berlaku secara umum. Kesimpulannya bahwa memahami budaya organisasi melalui dimensi dapat digambarkan budaya organisasi dari suatu organisasi tersebut. Menurut (Dhermawati Putri Mustikasari, 2013) indikator budaya organisasi :

- a. Model peran yang vesible.
- b. Komunikasi harapan.
- c. Pelatihan
- d. Hukuman bagi yang melanggar hukum.
- e. Mekanisme perlindungan.

2.1.11. Kompetensi

Menurut Wibowo (2007: 10) Kompetensi merupakan kemampuan dalam melakukan pekerjaan yang didasari oleh sikap kerja, keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Dari beberapa pendapat menurut para ahli dapat disimpulkan kompetensi adalah faktor terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi dimana kompetensi itu kepribadian yang terdapat dalam pribadi seseorang itu sendiri, guna untuk melakukan tugas yang di berikan. Indikator dari kompetensi yaitu penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai dengan perubahan perilaku. Menurut (Indirani & Kumar, 2016) indikator kompetensi :

- a. Pemahaman terhadap prosedur kerja.
- b. Pemahaman terhadap rencana dan target kerja.
- c. Pemahaman proses kerja bagian lainnya.
- d. Pemahaman situasi dan permasalahan organisasi.
- e. Kemampuan penyesuaian diri dan bekerja sama.
- f. Kemampuan menyampaikan ide.
- g. Pemahaman peralatan dan teknologi informasi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah dilakukan dan hasilnya menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya guna mendukung dan memberikan gambaran untuk melakukan penelitian. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut :

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Alat Ukur	Hasil Penelitian
1.	Sri Puspita Sari (2020)	Pengaruh <i>Fraud Diamond</i> bagi kecurangan pengelolaan keuangan desa (studi kasus pada pemerintah desa Kecatamatan Sidoarjo)	X1: Kesesuaian kompensasi X2: Sistem Pengendalian Internal X3: Budaya organisasi X4: Kompetensi Y: fraud dalam pengelolaan keuangan desa	Regresi Linier berganda	Pengaruh negatif signifikan antara kesesuaian kompensasi, sistem pengendalian intern dan budaya organisasi terhadap fraud, sedangkan kompetensi memiliki hasil positif signifikan terhadap fraud.
2	Anantawikrama Tungga Atmadya, Komang Adi Kurniawan Saputra (2017)	Pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa	X1: Kompetensi aparaturnya X2: Sistem pengendalian internal X3: Moralitas Y: fraud dalam pengelolaan keuangan desa	Regresi Linier berganda	bahwa kompetensi aparaturnya dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa, serta moralitas terbukti sebagai pemoderasi pengaruh kompetensi aparaturnya dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan

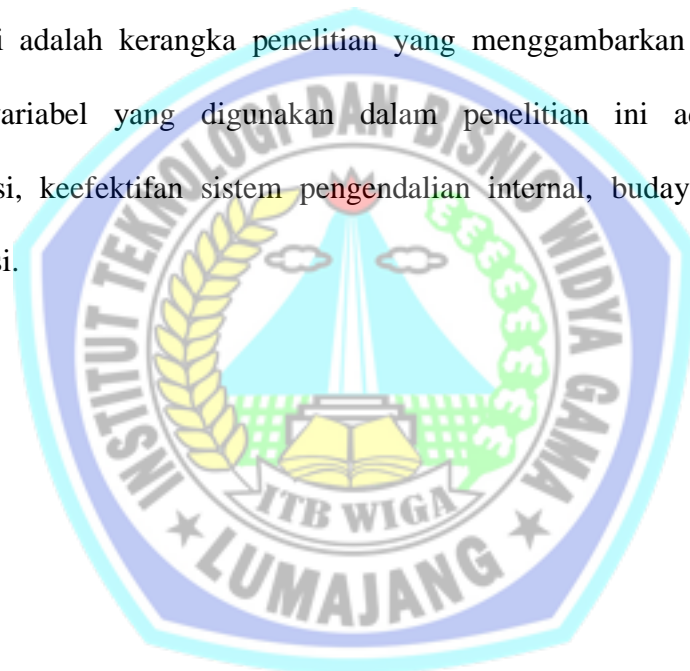
					keuangan desa.
3	Wasila Agustina (2019)	Perspektif <i>fraud diamond</i> terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa (Studi Empiris pada pemerintah desa kecamatan Ambulu)	X1: Kepuasan kompensasi X2: Gaya kepemimpinan X3: Sistem pengendalian internal pemerintah X4: Penegakan hukum X5: Budaya Organisasi X6: Perilaku tidak etis X7: Kompetensi Y: kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa	Regresi Linier Berganda	Penegakan Hukum dan Budaya Organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Sedangkan kepuasan kompensasi, gaya kepemimpinan, sistem pengendalian internal pemerintah, perilaku tidak etis, dan kompetensi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa
4	Akun Ilham Wahyudi, Susfa Yetti (2020)	Pengaruh <i>fraud diamond</i> terhadap kecurangan Laporan Keuangan pada kabupaten dan kota diprovinsi Jambi periode 2014 – 2018	X1: Pressure X2: Opportunity X3: Rationalizati on X4: Capability X5: Financial statement fraud Y: kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa	Regresi Berganda	Variabel tekanan dan kemampuan tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, variabel kesempatan dan variabel rasionalisasi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan

5	Nurul Aini, Made Aristia, Putu Gede Diamika (2017)	Pengaruh perspektif <i>fraud diamond</i> terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan (<i>fraud</i>) dalam Pengelolaan keuangan desa (studi empiris pada desa di Kabupaten Lombok Timur)	X1: Motivasi X2: Pengawasan X3: Rasionalisasi X4: Kompetensi Y: <i>SDM</i> kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa	Regresi Berganda	motivasi, pengawasan, rasionalisasi, dan kompetensi berpengaruh positif terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan (<i>fraud</i>) dalam pengelolaan keuangan desa.
6	Dila Cahyani Putri, Hartono, Nurhidayat (2019)	Pengaruh moralitas individu, pengendalian internal, dan budaya organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa (studi pada Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro)	X1: Moralitas Individu X2: Pengendalian internal X3: Budaya Organisasi Y: kecurangan akuntansi	Regresi Linier	Moralitas individu secara persial berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, pengendalian internal dan budaya organisasi secara persial berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, moralitas individu, pengendalian internal dan budaya organisasi secara simultan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

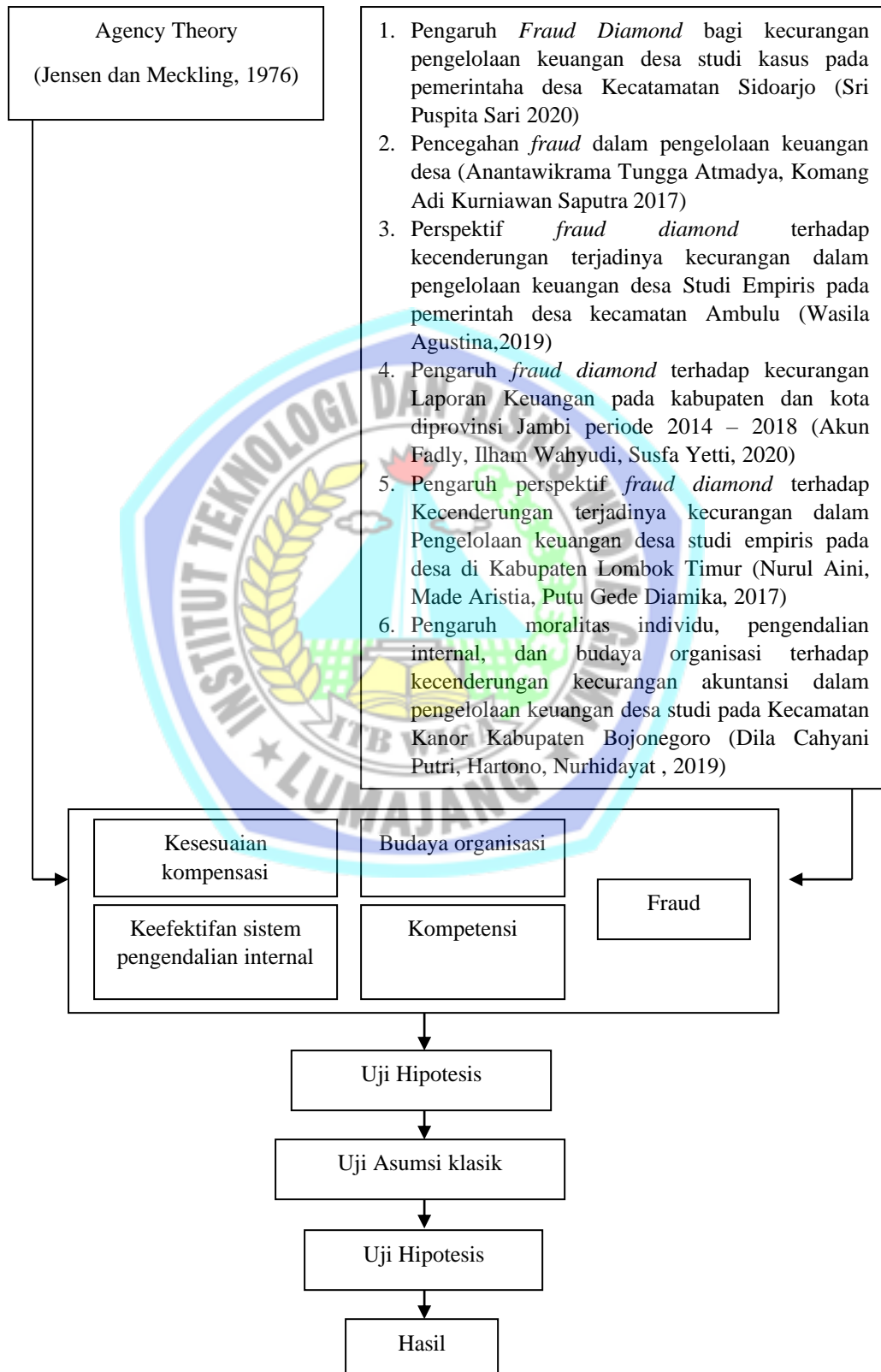
Sumber : Data diolah 2022

2.3 Kerangka Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2014) kerangka penelitian merupakan bentuk strategi konseptual yang mengkaitkan antara teori dengan berbagai faktor permasalahan yang dianggap penting untuk di selesaikan. Kerangka penelitian merupakan argumentasi peneliti dalam merumuskan suatu hipotesis. Kerangka penelitian dapat disajikan dalam bentuk bagan, deskriptif kualitatif atau gabungan keduanya. Untuk mempermudah penulis melakukan penelitian maka di sajikan gambar berikut ini adalah kerangka penelitian yang menggambarkan masalah-masalah peneliti variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesesuaian kompensasi, keefektifan sistem pengendalian internal, budaya organisasi, dan kompetensi.



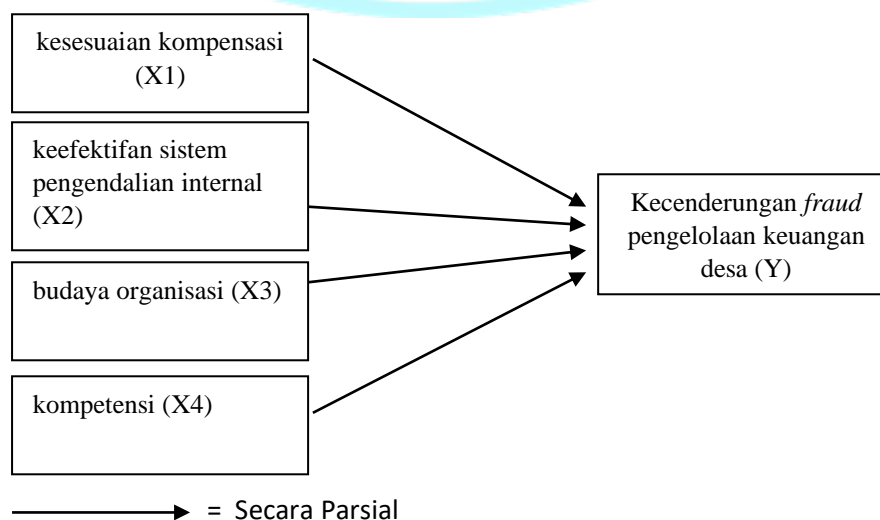
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran



2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah sistem yang terkait dengan tujuan dan konsep yang mendasari pelaporan keuangan yang dapat memperoleh standar yang konsisten untuk yang menjelaskan sifat, fungsi, dan batasan akuntansi dan pelaporan keuangan. Dalam penelitian ini variabel dependen yaitu cenderungnya terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab karena adanya perubahan atau terjadinya variabel terikat. Dalam penelitian ini ada 4 variabel independen diantaranya bystander effect dan whistleblowing. Lalu tujuan dari penelitian ini apakah variabel independen kesesuaian kompensasi (X1), keefektifan sistem pengendalian internal (X2), budaya organisasi (X3), kompetensi (X4) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu cenderungnya terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa (Y). Untuk lebih mudah menjelaskan hubungan antara variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut ini gambaran model penelitian yang digunakan seperti gambar dibawah ini

Gambar 2.2 kerangka konseptual



2.5 Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan hipotesis yang dinyatakan oleh peneliti. (Sugiyono, 2017) Hipotesis penelitian merupakan jawaban atau kesimpulan sementara atas permasalahan pada penelitian yang diyakini kebenarannya. Hipotesis penelitian yang diajukan oleh peneliti sebagai berikut :

2.4.1. Pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Kesesuaian kompensasi merupakan hak dari pegawai/ tim yang berhasil diberikan oleh atasan yang berguna untuk pekerjaan yang dilakukan berupa gaji, hadia, dan bonus serta asuransi yang dibayarkan kepada karyawan.

Hasil penelitian (Sri Puspita Sari, 2020) bahwa variable kompensasi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *fraud*. Hasil penelitian ini di perkuat lagi oleh (Agustina, 2019) menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan antara kesesuaian kompensasi dengan *fraud* didalam pengelolaan keuangan desa.

H1 : Faktor kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecurangan pengelolaan keuangan desa.

2.4.2. Pengaruh keefektifan sistem pengendalian internal terhadap kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Keefektifan sistem pengendalian internal dalam pemerintahan adalah proses yang dilakukan oleh direksi, manajemen, serta personel lain yang terdapat didalam entitas yang digunakan untuk menyediakan keyakinan guna mencapai tujuan yang diinginkan

Hasil penelitian (Atmadja & Saputra, 2017) bahwa variabel keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif yang signifikan dalam pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Dipertegas oleh (Agustina, 2019) bahwa keefektifan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

H2 : Faktor keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan pengelolaan keuangan desa.

2.4.3. Pengaruh budaya organisasi terhadap kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Budaya organisasi merupakan pandangan bersama yang dilakukan oleh anggota organisasi untuk memberikan penampilan yang berbeda dari organisasi lainnya (Chudasama & Robbins, 2003).

Hasil penelitian (Putri et al., 2019) bahwa budaya organisasi berpengaruh secara persial negatif signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Dan dipertegas dengan penelitian Sri Puspita Sari (2020) bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *fraud*.

H3 : Faktor budaya organisasi berpengaruh terhadap kecurangan pengelolaan keuangan desa.

2.4.4. Pengaruh kompetensi terhadap kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Menurut (Palan, 2007) mengatakan kompetensi merupakan karakteristik yang dimiliki seseorang yang berhubungan langsung yang memenuhi kriteria yang dapat menjalankan tugas.

Hasil penelitian (Aini et al., 2017) bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa. Kemudian dipertegas oleh penelitian Sri Puspita Sari (2020) yang hasilnya kompetensi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap terjadinya *fraud*.

H4 : Faktor kompetensi berpengaruh terhadap kecurangan pengelolaan keuangan desa.

